

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN OLEH PEGAWAI PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT  
(Studi Analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)**

**ENDEN SANTIKA DEWI**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kecamatan Cijulang telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa dari 12 indikator, 8 indikator sudah berjalan dengan baik dan 4 indikator lainnya kurang berjalan dengan baik. 2) adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kegiatan briefing yang dilakukan untuk menyampaikan perintah mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan kepada pegawai, kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan, kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. 3) Upaya yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan secara berulang-ulang kepada semua pegawai, melakukan bimbingan teknis mengenai pengelolaan perpustakaan, mengajukan proposal bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Perpustakaan.*

**A. PENDAHULUAN**

Peranan perpustakaan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan masyarakat sangatlah penting dan besar. Hal ini tentu dikarenakan perpustakaan merupakan unit lembaga yang memberikan suatu

pelayanan publik berupa penyediaan bahan-bahan pustaka. Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan secara garis besar menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengelola koleksi karya cipta manusia

yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pengguna perpustakaan.

Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai Kantor Perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Hal itu dapat dilihat dari hasil peninjauan yang penulis lakukan masih adanya beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan, yang dapat dilihat dari :

1. Fasilitas yang tersedia masih kurang memadai. Seperti rak buku sedikit yang mengakibatkan buku tidak dapat di simpan semua di rak dan sebagian di tumpuk dalam dus, tidak tersedianya meja dan kursi untuk membaca sehingga pengunjung perpustakaan tidak nyaman untuk membaca karena pengunjung membaca buku sambil berdiri.
2. Sistem pengadministrasian perpustakaan belum dikelola dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tersedianya kartu perpustakaan sehingga pengunjung tidak dapat meminjam buku dari perpustakaan.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan. Contohnya kurangnya staf perpustakaan dan kurangnya pegawai perpustakaan yang

profesional dalam pengelolaan perpustakaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai Kantor Perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai Kantor Perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pangandaran; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai Kantor Perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pangandaran?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Sekertaris Dinas Perpustakaan 1 (satu) orang, pegawai perpustakaan 6 (enam) orang, dan masyarakat 3 (tiga) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

## C. LANDASAN TEORITIS

### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (Kurniawan, 2017:17) merumuskan bahwa :

Istilah *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

### 2. Pengertian Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Pengertian kebijakan menurut Mustopa didjaja (Tahir, 2015:21) menjelaskan bahwa ‘istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan

tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan’.

### 3. Pengertian Perpustakaan

Pengertian perpustakaan menurut Hartono (2016:4), “perpustakaan berasal dari kata library dalam bahasa Inggris yang artinya perpustakaan, yang berasal dari kata dasar libri yang artinya pustaka, buku atau kitab”.

### 4. Pengertian Minat Baca

Pengertian minat baca menurut Wahadaniah (Ratnasari, 2011:16) ‘Minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam di sertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri atau ‘dorongan dari luar’.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di kecamatan cijulang kabupaten pangandaran)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi dari kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut:

**a. Komunikasi**

Penyampaian informasi mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan sudah disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada seluruh pegawai perpustakaan dengan jelas dan tepat untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan perpustakaan.

Penyampaian informasi mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan sudah disampaikan kepada seluruh pegawai perpustakaan melalui kegiatan *briefing* yang sering dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyampaian informasi mengenai keberadaan perpustakaan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan sosialisasi yang sering dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberadaan perpustakaan baik melalui kegiatan sosialisasi ke setiap desa dan sekolah untuk menyampaikan bahwa perpustakaan dibuka untuk umum.

**b. Sumber Daya**

Kemampuan sumber daya manusia yang ada di perpustakaan belum profesional dalam pengelolaan perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari hanya beberapa pegawai saja yang berlatarbelakang pendidikan perpustakaan, dan para pegawai tidak mempunyai pengalaman bekerja di bidang perpustakaan sehingga belum profesional dalam pengelolaan perpustakaan.

Penyediaan fasilitas di perpustakaan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari kurang tersedianya kursi dan meja baca bagi para pengunjung perpustakaan untuk membaca, terbatasnya buku-buku yang tersedia dalam rak buku, belum tersedianya kartu perpustakaan untuk pengunjung perpustakaan sehingga pengunjung tidak dapat meminjam buku penyediaan fasilitas di perpustakaan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari kurang tersedianya kursi dan meja baca bagi para pengunjung perpustakaan untuk membaca, terbatasnya buku-buku yang tersedia dalam rak buku, belum tersedianya kartu perpustakaan untuk pengunjung perpustakaan sehingga pengunjung tidak dapat meminjam buku.

Penyediaan anggaran/dana dalam penyelenggaraan perpustakaan belum memadai dan belum mencukupi, hal ini dapat dilihat dari kurang tersedianya sarana dan prasarana di perpustakaan, kurang diperhatikan keberadaan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sehingga anggaran/dana yang diberikan masih minim untuk pengadaan fasilitas di perpustakaan

**c. Disposisi**

Setiap pelaksana sudah mempunyai kemauan, keinginan yang dijadikan motivasi dan dorongan pada diri masing-masing untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan perpustakaan.

Petunjuk atau arahan tersebut dilakukan secara lisan pada saat briefing dan memantau secara langsung pada saat melaksanakan program (pengelolaan perpustakaan) sehingga para pegawai paham dan menjalankan program (pengelolaan perpustakaan) tersebut dengan baik.

Pelayanan yang diberikan oleh pegawai perpustakaan kepada pengunjung perpustakaan belum maksimal karena terbatasnya fasilitas yang tersedia di perpustakaan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap pelaksana guna mempermudah pegawai perpustakaan dalam melaksanakan pekerjaan, kegiatan, dan tujuan dari perpustakaan dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik. Tugas pokok dan fungsi pegawai perpustakaan di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Perpustakaan dijadikan pedoman atau acuan oleh para pegawai perpustakaan untuk melaksanakan pekerjaan atau suatu kegiatan, dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai perpustakaan.

sudah ada pembagian tanggungjawab kepada setiap pelaksana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Setiap pelaksana atau pegawai mempunyai tanggungjawabnya terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## **2. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis kecamatan cijulang kabupaten pangandaran)**

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis kecamatan cijulang kabupaten pangandaran) dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Komunikasi**

Tidak terdapat hambatan dalam penyampaian informasi mengenai perintah untuk mengimplementasikan kebijakan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dengan jelas dan tepat kepada semua pegawai perpustakaan.

Tidak terdapat hambatan dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan pengelolaan perpustakaan sudah disampaikan kepada semua pegawai perpustakaan.

Tidak terdapat hambatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan perpustakaan karena selalu mengadakan kegiatan seperti mengadakan perpustakaan keliling ke setiap desa sebagai akses meningkatkan minat baca masyarakat.

#### **b. Sumber Daya**

Terdapat hambatan dalam kemampuan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan yaitu pegawai perpustakaan sebagian besar bukan berlatarbelakang pendidikan perpustakaan sehingga sulit dalam pengelolaan perpustakaan karena tidak dibekali ilmu tentang perpustakaan dan tidak adanya pengalaman bekerja dibidang perpustakaan.

Terdapat hambatan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung dalam penyelenggaraan perpustakaan yaitu kurangnya anggaran yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Terdapat hambatan dalam anggaran atau dana dalam penyelenggaraan perpustakaan yaitu kurang tersedianya atau masih minimnya anggaran yang diberikan baik dari APBD Kabupaten dan Provinsi sehingga belum bisa digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana secara maksimal.

#### **c. Disposisi**

Tidak terdapat hambatan dalam kemauan, keinginan dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan karena masing-masing pegawai mempunyai keinginan, kemauan untuk melaksanakan kebijakan.

Tidak terdapat hambatan dalam petunjuk atau arahan yang diberikan oleh atasan kepada para pelaksana

dalam menjalankan program (pengelolaan perpustakaan) karena petunjuk atau arahan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipahami oleh semua pegawai perpustakaan dan melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab yang tinggi.

Terdapat hambatan dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai perpustakaan terhadap pengunjung perpustakaan yaitu kurangnya pemahaman mengenai pelayanan yang baik kepada pengunjung perpustakaan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Tidak terdapat hambatan dalam kejelasan tugas pokok dan fungsi para pegawai sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran.

Tidak terdapat hambatan dalam standar operasional prosedur (SOP) setiap alur kegiatan diatur dalam SOP sehingga pegawai perpustakaan bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Tidak terdapat hambatan dalam pembagian tanggungjawab kepada setiap pegawai. Setiap pegawai paham dan melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggungjawab yang penuh.

**3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di**

### **Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)**

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) dapat diuraikan, sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Tidak terdapat upaya yang dilakukan karena sudah ada penyampaian informasi yang dilakukan oleh Sekertaris Dinas mengenai kebijakan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dengan jelas dan tepat kepada semua pegawai perpustakaan.

Tidak terdapat upaya yang dilakukan karena penyampaian informasi mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan telah disampaikan kepada semua pegawai.

Tidak terdapat upaya yang dilakukan karena penyampaian informasi mengenai keberadaan perpustakaan kepada masyarakat telah dilakukan dengan mengadakan kegiatan perpustakaan keliling ke setiap desa dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa perpustakaan daerah dapat dikunjungi oleh semua kalangan.

#### **b. Sumber Daya**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam

kemampuan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan yaitu melakukan kegiatan bimbingan teknis mengenai pengelolaan perpustakaan yang baik kepada setiap pegawai, dan memberikan motivasi kepada pegawai agar bekerja dengan benar dan berwawasan luas mengenai pengelolaan perpustakaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung dalam penyelenggaraan perpustakaan yaitu meminta bantuan kepada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten dan mengajukan proposal ke Provinsi dan Pusat mengenai bantuan keuangan untuk pengadaan fasilitas dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam anggaran atau dana dalam penyelenggaraan perpustakaan yaitu mengajukan proposal bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk pengadaan fasilitas dalam penyelenggaraan perpustakaan.

#### **c. Disposisi**

Tidak terdapat upaya yang dilakukan karena setiap pegawai mempunyai kemauan, keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tidak terdapat upaya yang dilakukan karena petunjuk/arahan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas cukup jelas sehingga mudah di pahami dan pegawai perpustakaan dapat

menjalankan program (pengelolaan perpustakaan) dengan baik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan yang diberikan pegawai perpustakaan terhadap pengunjung perpustakaan yaitu memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada semua pegawai perpustakaan khususnya pegawai di bidang layanan cara memberikan layanan yang baik kepada pengunjung perpustakaan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Tidak terdapat upaya yang dilakukan karena setiap pegawai perpustakaan mempunyai kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016.

Tidak terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) karena di perpustakaan daerah setiap bidang mempunyai SOP masing-masing agar melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan perintah-perintah yang terdapat dalam SOP tersebut.

Tidak terdapat upaya yang dilakukan dalam pembagian tanggungjawab kepada setiap pelaksana karena setiap pegawai mempunyai tanggungjawabnya masing-masing terhadap tugas pokok, dan fungsinya.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) masih belum optimal. Dari 12 indikator, 8 indikator sudah berjalan dengan baik dan 4 indikator lainnya kurang berjalan dengan baik.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran), yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan hampir semua pegawai perpustakaan bukan lulusan dari pendidikan perpustakaan dan tidak adanya pengalaman bekerja di bidang perpustakaan sehingga kesulitan dalam pengelolaan perpustakaan yang baik karena tidak dibekali ilmu tentang perpustakaan; kurangnya fasilitas yang tersedia dalam penyelenggaraan perpustakaan; kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pengadaan fasilitas yang belum memadai; kurangnya pemahaman yang dimiliki setiap pegawai



mengenai pelayanan yang harus dilakukan untuk pengunjung perpustakaan; dan

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran), yaitu memberikan pendampingan khusus terkait pengelolaan perpustakaan kepada setiap pegawai, dan memberikan motivasi kepada pegawai agar bekerja dengan benar dan berwawasan luas mengenai pengelolaan perpustakaan; meminta bantuan kepada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten dan mengajukan proposal ke Provinsi dan Pusat mengenai bantuan keuangan untuk pengadaan fasilitas dalam penyelenggaraan perpustakaan; memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada semua pegawai perpustakaan khususnya pegawai di bidang layanan cara memberikan layanan yang baik kepada pengunjung perpustakaan.

*Negeri 1 Parigi Kabupaten Pangandaran. (Studi Deskriptif Tentang Realisasi Penggunaan Dana Pangandaran Hebat).*

Hartono. 2016. *Manajemen Perpustakaan Profesional*. Jakarta: Sagung Seto.

Meliyawati. 2016. *Pemahaman Dasar Membaca*. Sleman: Deepublish.

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Kurniawan. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Di Sekolah Menengah Atas*